

**KEDUDUKAN JANDA DALAM PEWARISAN BERDASARKAN
HUKUM WARIS ADAT**

(Studi Kasus di Suku Samin Desa Klopo Duwur Kecamatan Banjarejo
Kabupaten Blora)



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

DITA RENGGA PANGESTU
C100130154

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEDUDUKAN JANDA DALAM PEWARISAN BERDASARKAN
HUKUM WARIS ADAT**

(Studi Kasus di Suku Samin Desa Klopo Duwur Kecamatan Banjarejo
Kabupaten Blora)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

DITA RENGGA PANGESTU
C100130154

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N.
NIK. 244

HALAMAN PENGESAHAN

**KEDUDUKAN JANDA DALAM PEWARISAN BERDASARKAN
HUKUM WARIS ADAT**

(Studi Kasus di Suku Samin Desa Klopo Duwur Kecamatan Banjarejo
Kabupaten Blora)

Oleh:

DITA RENGGA PANGESTU
C100130154

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Rabu, 8 Februari 2017

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

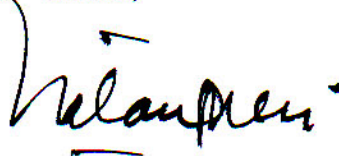
Dewan Penguji:

1. Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Darsono, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Shalman Al-Farizy, S.H., M.M., M.Kn.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()



Dekan,



Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum
NIK. 536

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 7 Februari 2017

Penulis



DITA RENGGA PANGESTU
C100130154

KEDUDUKAN JANDA DALAM PEWARISAN BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT

(Studi Kasus di Suku Samin Desa Klopo Duwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pewarisan menurut hukum adat di suku sikep samin, serta ntuk mengetahui kedudukan janda dalam pewarisan berdasarkan hukum adat di suku Sikep Samin. Metode pendekatan yang digunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Suku Sikep Samin Desa Klopo Duwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. Metode pengumpulan data dengan teknik studi lapangan melalui wawancara dan observasi, serta studi pustaka berupa data dari bahan-bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan janda dalam pewarisan menurut hukum waris adat Suku Sikep Samin, dapat digolongkan menjadi 4 (empat) macam, yakni janda yang disebabkan karena meninggalnya suami dan mempunyai anak, janda yang disebabkan karena meninggalnya suami dan tidak mempunyai anak, janda yang disebabkan karena perceraian dan mempunyai anak, serta janda yang disebabkan karena perceraian dan tidak mempunyai anak.

Kata kunci: *pewarisan, janda, Suku Sikep Samin*

ABSTRACT

This study aims to determine the process of inheritance under customary law in Sikap Samin ethnic, as well as knowing the position of widows ntuk in inheritance based on customary law in Sikep Samin ethnic. The method used juridical empirical approach is descriptive. The research location Sikep Samin ethnic village Klopo Duwur Banjarejo District of Blora. Data were collected by engineering field study through interviews and observations, as well as data from the literature in the form of library materials. Based on the results of research and discussion it can be concluded that the position of widows in inheritance according to the law of inheritance indigenous Sikep Samin ethnic, can be classified into 4 (four) types, ie widows who caused the death of her husband and have children, widows who caused the death of her husband and did not have children, widows caused by divorce and have children, and widows caused by divorce and had no children.

Keywords: *inheritance, widow, Sikep Samin ethnic*

1. PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan salah satu aturan hukum yang masih digunakan dalam proses pewarisan. Proses pewarisan yang mengedepankan musyawarah sebagai landasannya merupakan hal terpenting, agar keselarasan dan kerukunan dalam keluarga tetap terjaga. Pewarisan merupakan salah satu proses yang dilalui dalam kehidupan keluarga. Pewarisan mempunyai arti dan pemahaman sebagai salah satu proses beralihnya harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya. Keberadaan ahli waris mempunyai kedudukan penting dalam proses pewarisan. Kedudukan ahli waris, seperti janda harus dipenuhi haknya sebagai ahli waris dalam pembagian harta warisan.

Pengertian yang lazim di Indonesia pewarisan ialah perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.¹ Secara umum dalam setiap pewarisan disyaratkan memenuhi unsur-unsur yang terdiri atas: (a) pewaris, (b) harta warisan, dan (c) ahli waris.² Pengertian pewaris sendiri dapat diartikan sebagai seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup.³ Ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris.⁴ Sementara itu, harta warisan menurut hukum adat adalah harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh semasa masa perkawinan dan harta bawaan.⁵

Proses beralihnya harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya harus dilakukan sesuai ketentuan aturan hukum yang berlaku, dengan tetap menjadikan musyawarah dan kesepakatan sebagai landasan dalam pembagiannya. Keberadaan hukum waris adat sangat penting dalam proses pewarisan, keberadaan hukum waris adat tersebut dapat dijadikan dasar dalam tatanan pembagian harta warisan dalam keluarga. Pengertian hukum waris adat sendiri adalah aturan-aturan hukum yang

¹ Muslich Maruci, *Ilmu Waris*, Semarang: Penerbit Mujahidin, 1990, hal. 1.

² Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 2.

³ Mg. Sri Wiyarti, *Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bagian B, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2000, hal. 4.

⁴ *Ibid.*,

⁵ Satrio Wicaksono, *Hukum Waris: Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta: Transmedia Pustaka. 2011, hal. 10.

mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut.⁶

Perpindahan harta warisan harus mampu dilakukan dengan jalan kekeluargaan, dengan menjadikan musyawarah dan kebersamaan sebagai rujukannya. Kebersamaan dalam hubungan kekerabatan harus dipertahankan sebagai identitas nilai luhur, seperti keberadaan suku samin yang tetap menjaga kebersamaan dalam hubungan kekerabatan sebagai identitas budaya yang tetap dijaga. Dalam menjaga dan melestarikan hubungan kekerabatan masyarakat samin memiliki tradisi untuk saling berkunjung terutama pada saat satu keluarga mempunyai hajat sekalipun tempat tinggal jauh.⁷ Hubungan kekerabatan dalam hukum waris adat harus tetap dijaga sebagai salah satu aturan dan rujukan dalam pembagian warisan, seperti dalam keluarga suku samin yang mendasarkan musyawarah dan mufakat sebagai dasar dan landasan pembagian harta warisan dalam keluarga.

Janda adalah wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun ditinggal mati suaminya.⁸ Secara umum keberadaan janda dapat digolongkan menjadi dua, yakni janda yang mempunyai anak dan janda yang tidak mempunyai anak. Kedudukan janda dianggap sangat penting setelah meninggalnya suami, ada hak dan tanggung jawab yang harus dipikul janda dalam suatu keluarga. Janda sebagai salah satu orang yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris, mempunyai peranan yang penting dalam proses pewarisan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengemukakan permasalahan yang akan diteliti yaitu: (1) Bagaimana proses pewarisan menurut hukum adat di Suku Sikep Samin?, dan (2) Bagaimana kedudukan janda dalam pewarisan berdasarkan hukum adat di Suku Sikep Samin? Sedangkan penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui proses pewarisan menurut hukum adat di Suku Sikep Samin dan serta untuk mengetahui kedudukan janda dalam pewarisan berdasarkan hukum adat di Suku Sikep Samin.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 1993, hal. 23.

⁷ Ajaran Samin. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ajaran_Samin. Diunduh pada hari Senin 12 Oktober 2016. Pukul 13:35.

⁸ Arti kata janda. <http://kbbi.web.id/janda>. Diunduh pada hari Senin 12 Oktober 2016. Pukul 13:35.

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah: (1) Manfaat Teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan khususnya hukum perdata, terutama mengenai kedudukan janda dalam pewarisan berdasarkan hukum adat, (2) Manfaat Praktis, yaitu (a) Untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dan (b) Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai cara mengatasi masalah tentang kedudukan janda dalam pewarisan berdasarkan hukum adat.

2. METODE

Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis empiris.⁹ Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan, mengidentifikasi secara objektif dengan tujuan memberikan gambaran riil mengenai kedudukan janda dalam pewarisan berdasarkan hukum waris adat. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan atau obyek penelitian sebagaimana adanya.¹⁰ Sumber data terdiri dari data primer yakni sejumlah keterangan atau fakta, serta hasil wawancara dan data sekunder berupa berupa buku-buku tentang hukum adat dan waris adat di Indonesia, serta kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi, serta studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat di dalam Suku Sikep Samin

Pengertian hukum waris adat sendiri adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut.¹¹

⁹ Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasikan hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya, Lihat Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo, 2003, hal. 19.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1988, hal. 12.

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993, hal. 23.

Menurut Soepomo dalam bukunya bab-bab tentang Hukum Adat, bahwa hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud (*immateriele goederen*), dari suatu angkatan generasi manusia kepada keturunannya.¹² Pengertian tersebut memiliki makna bahwa dalam proses pewarisan melibatkan pewaris dengan ahli warisnya, serta mengoperkan harta warisan dari satu generasi kepada generasi selanjutnya.

Keberadaan hukum waris adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dari masyarakat hukum yang bersangkutan, serta berpengaruh pada harta kekayaan yang ditinggalkan dalam masyarakat tersebut.¹³ Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora mengenai proses pembagian harta warisan terhadap kedudukan janda berdasarkan hukum waris adat Suku Sikep Samin, yakni sebagai berikut:

Pertama, Janda Mati Memiliki Anak, merupakan wanita yang ditinggal mati oleh pasangan pernikahannya, dimana dalam pernikahannya tersebut telah memiliki anak. Kedudukan perempuan (janda) disini berarti tidak memiliki pasangan atau memiliki status sebagai pribadi sendiri (*single*) yang disebabkan berpisah dengan suami karena meninggal dunia. Kedudukan janda yang mempunyai anak dianggap mempunyai fungsi ganda, selain berperan untuk mempertahankan hidupnya sendiri, janda tersebut juga harus bertanggung-jawab atas perkembangan anaknya tersebut.

Kedua, Janda Mati Tidak Memiliki Anak, merupakan wanita yang ditinggal mati oleh pasangan pernikahannya, di mana dalam pernikahannya tersebut tidak memiliki anak. Kedudukan janda yang tidak mempunyai anak di sini berarti sebagai perempuan *single*, karena ketika melangsungkan pernikahan dengan suaminya sebelum meninggal dunia, tidak mempunyai keturunan. Keberadaan janda tersebut secara individu berhak untuk melanjutkan kehidupannya, salah satunya untuk menikah kembali, dengan tetap menjaga silaturahmi dengan keluarga suami (Almarhum).

Ketiga, Janda Cerai Memiliki Anak, merupakan wanita yang telah bercerai dari pasangan pernikahannya, dimana dalam pernikahannya tersebut sudah memiliki

¹² Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hal. 72.

¹³ Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung, 1990, hal. 165.

anak. Keberadaan perempuan (janda) yang bercerai dan mempunyai anak, dianggap sebagai pribadi yang sendiri (*single*). Kedudukan janda akibat perceraian yang mempunyai anak mempunyai posisi yang sangat penting untuk mengurus dan mendidik anak-anaknya, karena sebagian besar keberadaan anak korban perceraian akan ikut ibu dibandingkan ikut bapaknya.

Keempat, Janda Cerai Tidak Memiliki Anak, merupakan wanita yang telah bercerai dari pasangan pernikahannya, di mana dalam pernikahannya tersebut tidak memiliki anak. Keberadaan janda yang tidak mempunyai anak di sini berarti sebagai perempuan *single* setelah terjadinya perceraian, karena ketika melangsungkan pernikahan dengan suaminya, janda tersebut tidak mempunyai keturunan. Keberadaan janda tersebut secara individu berhak untuk melanjutkan kehidupannya, salah satunya untuk menikah kembali. Masyarakat Suku Sikep Samin membedakan janda kedalam dua pengertian yaitu janda karena kematian suami dan janda karena perceraian. Peristiwa pewarisan terhadap janda karena kematian suami hanya bisa terjadi setelah pewaris meninggal dunia, dalam hal ini yang disebut pewaris adalah sang suami.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis mengenai proses pembagian harta warisan terhadap kedudukan janda menurut hukum waris adat Suku Sikep Samin, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

Pertama, kedudukan janda dalam pewarisan berdasarkan hukum waris adat di dalam Suku Samin. Aturan Hukum Adat Suku Sikep Samin dalam sistem pembagian harta warisan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lasio, selaku tokoh adat masyarakat Suku Sikep Samin, maka diperoleh aturan hukum mengenai pembagian harta warisan di dalam kehidupan masyarakat, khususnya mengenai kedudukan janda. Adapun ketentuan dan aturan dalam pewarisan adalah: (1) Pembagian harta warisan di masyarakat adat Suku Sikep Samin didasarkan pada adat kebiasaan Suku Sikep Samin, dengan mendasarkan musyawarah dan kesepakatan dalam keluarga sebagai acuan utamanya, (2) Proses pembagian harta warisan di masyarakat adat Suku Sikep Samin, akan terlebih dahulu diberitahukan kepada tokoh masyarakat

¹⁴Lasio, Pimpinan Tokoh Adat di Suku Sikep Samin Blora, *Wawancara Pribadi*, Blora, Rabu, 28 September 2016, pukul 10.00 WIB.

Suku Sikep Samin, yang selanjutnya akan dimusyawarahkan dengan tokoh adat dan masyarakat, yang dihadiri para pihak yang akan melakukan pembagian harta warisan tersebut, (3) Pembagian harta warisan di masyarakat adat Suku Sikep Samin didasarkan pada musyawarah dan mufakat, serta kesepakatan keluarga sebagai dasar acuan dalam proses pembagiannya.¹⁵

Selanjutnya (4) Pembagian harta warisan harus menghadirkan para pihak, yang dalam hal ini pewaris dan ahli warisnya, yang turut disaksikan tokoh adat masyarakat Suku Sikep Samin, beserta perwakilan warga masyarakat Samin sebagai saksi, (5) Pembagian warisan yang sudah disepakati bersama selanjutnya akan ditetapkan, di mana semenjak penetapan tersebut, maka para pihak harus menaati dan menghargai kesepakatan tersebut, sebagai dasar hukum yang harus ditaati, dan (6) Apabila kemudian hari terjadi permasalahan, maka sebaiknya harus diselesaikan di kantor desa, yang dihadiri para pihak yang bersengketa, serta tokoh adat Suku Sikep Samin beserta masyarakat sebagai saksi, namun apabila tidak bisa diselesaikan di kantor desa, maka dipersilahkan kepada para pihak yang bersengketa untuk mengajukan gugatan ke jalur hukum.

Kedua, kedudukan janda dalam pewarisan menurut hukum waris adat Suku Samin. Kedudukan janda dalam pembagian harta warisan dalam perkawinan, pembagian warisannya dapat dilakukan antara lain: (1) Pada prinsipnya harta bawaan kembali kepada masing-masing pihak yang membawanya. Hal itu berarti harta bawaan yang dibawa oleh pewaris akan kembali kepada keluarga pewaris, (2) Harta gono-gini pada prinsipnya merupakan hak bagi janda yang masih hidup, (3) Bagi barang-barang yang didapat suami atau isteri baik sebagai hibah atau warisan yang di dapat selama mereka masih dalam satu perkawinan maka barang itu dapat disamakan dengan harta bawaan masing-masing pihak, (4) Jika harta gono-gini belum mencukupi bagi kehidupan sehari-hari maka harta asal suami dapat digunakan oleh janda sampai meninggal dunia atau sampai janda itu kawin lagi.¹⁶

¹⁵Lasio, Pimpinan Tokoh Adat di Suku Sikep Samin Blora, *Wawancara Pribadi*, Blora, Rabu, 28 September 2016, pukul 10.00 WIB.

¹⁶Lasio, Pimpinan Tokoh Adat di Suku Sikep Samin Blora, *Wawancara Pribadi*, Blora, Rabu, 28 September 2016, pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis mengenai kedudukan janda dalam pembagian harta warisan, yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan contoh kasus yang pertama janda mati memiliki anak. Pembagian harta warisan keluarga ibu Saminah binti Tarsio dengan dua orang anaknya yang bernama Bapak Sunarto dan Ibu Sunarti, maka diketahui mengenai kedudukan janda dalam sistem pembagian harta warisan menurut hukum waris adat Suku Sikep Samin adalah: (1) Kedudukan Ibu Saminah binti Tarsio (Janda) tidak memperoleh bagian dalam pembagian harta warisan tersebut, tetapi memiliki hak untuk tetap tinggal di rumah yang dibagikan tersebut, dengan tetap memperoleh biaya hidup yang layak dari anak-anaknya yaitu, Ibu Sunarti dan Bapak Sunarto, (2) Pembagian harta bersama tersebut didasarkan pada kesepakatan para pihak yang telah disetujui juga oleh pewaris. Mengenai pewaris Ibu Saminah binti Tarsio (Janda) akan ikut anak pertama yaitu Bapak Sunarto. Untuk selanjutnya mengenai biaya dan kebutuhan hidup untuk Ibu Saminah binti Tarsio akan ditanggung secara bersama antara Bapak Sunarto dan Ibu Sunarti sesuai dengan kesepakatan pembagian harta warisan tersebut.¹⁷

Kedua, berdasarkan contoh kasus yang kedua janda mati tidak memiliki anak. Pembagian harta warisan Ibu Waliyah dengan keluarga besarnya, yang dalam hal ini keluarga Ibu Waliyah dan keluarga Bapak Sudarto (Almarhum), maka diketahui mengenai kedudukan janda dalam sistem pembagian harta warisan menurut hukum waris adat Suku Sikep Samin, yaitu: (1) Tanah dan bangunan rumah seluas 480 m² dengan disertai sertifikat hak milik menjadi milik Ibu Waliyah selaku istri dari Bapak Sudarto (Almarhum), karena tanah dan bangunan rumah tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh saat dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga.

Selain itu dalam pernikahan antara Ibu Waliyah dengan Bapak Sudarto tidak memiliki keturunan, sehingga berdasarkan kesepakatan keluarga besar, baik dari keluarga Ibu Waliyah dan Bapak Sudarto maka tanah dan bangunan rumah tersebut menjadi milik Ibu Waliyah, (2) Tanah sawah luas 340 m² dengan disertai sertifikat

¹⁷Lasio, Pimpinan Tokoh Adat di Suku Sikep Samin Blora, *Wawancara Pribadi*, Blora, Rabu, 28 September 2016, pukul 10.00 WIB.

hak milik dikembalikan kepada keluarga asal Bapak Sudarto, mengingat Tanah sawah tersebut merupakan harta asal dari Bapak Sudarto yang di bawah saat perkawinan dengan Ibu Waliyah.¹⁸

Ketiga, berdasarkan contoh kasus yang ketiga janda cerai memiliki anak. Mengenai hal pembagian harta warisan Ibu Tumini dan Bapak Sarimin dengan anak mereka Bapak Sumarjo, maka diketahui mengenai kedudukan janda dalam sistem pembagian harta warisan menurut hukum adat Suku Samin, yaitu: (1) Tanah seluas 840 m² beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan disertai sertifikat hak milik, menjadi milik Bapak Sumarjo selaku anak dari pernikahan Ibu Tumini dan Bapak Sarimin, dimana hal tersebut di dasarkan karena tanah dan bangunan rumah tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh saat dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga.

Selain itu dalam pernikahan antara Ibu Tumini dan Bapak Sarimin hanya memiliki satu keturunan, sehingga berdasarkan kesepakatan para pihak, maka mereka sepakat untuk memberikan tanah dan bangunan rumah tersebut menjadi milik Bapak Sumarjo, (2) Mengenai kedudukan Janda dari Ibu Tumini, yang merupakan seorang ibu dari Bapak Sumarjo, dan merupakan seorang janda dari perceraian pernikahan dengan Bapak Sarimin, maka keberadaanya tetap boleh tinggal di rumah harta bersama yang telah dibagi tersebut. Ibu Tumini tetap mempunyai hak untuk tetap tinggal di rumah tersebut, dan mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dan pemenuhan kehidupan yang layak dari anak mereka Bapak Sumarjo sampai Ibu Tumini meninggal dunia atau menikah lagi.¹⁹

Keempat, berdasarkan contoh kasus yang keempat janda cerai tidak memiliki anak. Mengenai hal pembagian harta warisan Ibu Sartiah dan Bapak Tarmono, maka diketahui mengenai kedudukan janda dalam sistem pembagian harta warisan menurut hukum adat Suku Samin, yaitu: (1) Tanah seluas 640 m² beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan disertai sertifikat hak milik tersebut, menjadi milik bersama antara Ibu Sartiah dan Bapak Tarmono, dimana hal tersebut didasarkan

¹⁸Lasio, Pimpinan Tokoh Adat di Suku Sikep Samin Blora, *Wawancara Pribadi*, Blora, Rabu, 28 September 2016, pukul 10.00 WIB.

¹⁹Lasio, Pimpinan Tokoh Adat di Suku Sikep Samin Blora, *Wawancara Pribadi*, Blora, Rabu, 28 September 2016, pukul 10.00 WIB.

karena tanah dan bangunan rumah tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh saat dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga. Selain itu dalam pernikahan antara Ibu Sartiah dan Bapak Tarmono tidak memiliki keturunan, sehingga berdasarkan kesepakatan para pihak, baik dari pihak Ibu Sartiah dan Bapak Tarmono sepakat untuk membagi tanah dan bangunan rumah tersebut menjadi 2 bagian secara adil. (2) Mengenai keberadaan harta asal dalam perkawinan yang dibawa saat pernikahan oleh Bapak Tarmono, kedudukan Ibu Sartiah adalah menerima harta asal tersebut untuk kembali kepada Bapak Tarmono, karena bagaimanapun harta asal tersebut menjadi hak Bapak Tarmono, karena harta asal tersebut dibawa Bapak Tarmono saat pernikahan berlangsung.²⁰

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa, seorang janda berhak untuk membagi-bagikan harta keluarga kepada semua anak, asal saja setiap anak mendapat bagian yang sama/pantas. Kedudukan janda yang dimaksud tersebut ialah janda yang telah lama hidup bersama dalam perkawinan dengan almarhum suaminya. Tetapi apabila seorang perempuan belum lama kawin, belum mempunyai anak, bahkan belum ada barang gono gini dan suaminya meninggal dunia, maka barang asal suaminya pulang kembali kepada keluarga si suami. Dalam kedudukan tertentu seorang janda perempuan juga dapat memperoleh hasil dari barang asal suaminya, dalam arti sekurang-kurangnya dari barang asal itu sebagian harus tetap berada di tangan janda, sepanjang perlu untuk hidup secara pantas sampai meninggal dunia atau kawin lagi.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, proses pembagian harta warisan pada masyarakat Suku Sikep Samin, khususnya terhadap kedudukan janda dilaksanakan menurut hasil dari kesepakatan para pihak, yang dalam hal ini adalah pihak janda dan pihak keluarga yang terlibat (suami ketika bercerai, keluarga suami (almarhum) apabila meninggal dunia, serta pihak anak apabila janda tersebut memiliki anak). Proses Pewarisan menurut Hukum Waris Adat di dalam Suku Sikep Samin terhadap keberadaan dan

²⁰Lasio, Pimpinan Tokoh Adat di Suku Sikep Samin Blora, *Wawancara Pribadi*, Blora, Rabu, 28 September 2016, pukul 10.00 WIB.

kedudukan janda dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yakni janda yang disebabkan karena meninggalnya suami dan mempunyai anak, janda yang disebabkan karena meninggalnya suami dan tidak mempunyai anak, janda yang disebabkan karena perceraian dan mempunyai anak, serta janda yang disebabkan karena perceraian dan tidak mempunyai anak.

Kedua, kedudukan janda dalam pewarisan menurut hukum waris adat Suku Sikep Samin, dapat di digolongkan menjadi 4 (empat) macam, yakni janda yang disebabkan karena meninggalnya suami dan mempunyai anak, maka kedudukan janda tersebut tetap memiliki hak untuk tetap tinggal dan mendapatkan hasil dari harta yang dibagikan tersebut untuk biaya selama hidup janda dan untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya. Janda yang disebabkan karena meninggalnya suami dan tidak mempunyai anak, maka kedudukan janda tersebut terhadap harta bersama dengan suaminya yang meninggal dunia akan menjadi milik janda, dengan catatan pembagian harta tersebut mendapatkan persetujuan keluarga besar (keluarga pihak suami dan keluarga pihak janda), sedangkan mengenai barang asal suaminya akan pulang kembali kepada keluarga si suami.

Janda yang disebabkan karena perceraian dan mempunyai anak, maka kedudukan janda tersebut tetap memiliki hak terhadap harta bersama untuk tetap tinggal dan mendapatkan hasil dari harta yang dibagikan tersebut untuk biaya selama hidup janda tersebut dan untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya. Janda yang disebabkan karena perceraian dan tidak mempunyai anak, maka kedudukan janda tersebut terhadap harta bersama dengan suaminya, akan dibagi secara adil menjadi dua, sedangkan mengenai harta asal dalam perkawinan akan kembali menjadi milik masing-masing pihak (pihak suami dan janda).

Saran

Pertama, bagi ahli waris, dalam proses pembagian harta warisan sebaiknya dilakukan melalui jalur musyawarah, apalagi berkaitan dengan pembagian terhadap kedudukan janda. Essensi kebersamaan dalam keluarga, baik dengan anak kandung dan keluarga besar (keluarga pihak suami dan keluarga pihak janda), harus menjadi tujuan bersama. Kesepakatan dan kebersamaan merupakan nilai dasar dalam pembagian harta warisan. Diharapkan pembagian harta bersama dengan jalur

musyawarah yang didasari nilai kebersamaan, akan tetap mempererat hubungan kekeluargaan.

Kedua, bagi masyarakat dan tokoh adat yang menjadi panutan (Pemimpin Suku Sikep Samin), diharapkan untuk tetap menjaga dan mempertahankan nilai dan aturan adat sebagai dasar dalam kehidupan masyarakat, khususnya mengenai pembagian harta warisan agar keberadaan hukum adat tersebut tetap terjaga dan lestari. Pemahaman bahwa hukum waris adat adalah nilai luhur warisan nenek moyang yang luhur, harus tetap dijaga dan dipertahankan sebagai identitas dan panutan hidup masyarakat Suku Sikep Samin.

Persantunan

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada: Orang tua saya tercinta atas doa, dukungan yang penuh dan juga penantiannya. Saudaraku tersayang atas dukungan, doa dan semangatnya. Teman-teman semua yang kusayangi, terimakasih atas do'a, dorongan, semangatnya, motivasi, dukungan dan doanya selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ali, Zainuddin, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asikin, Zainal & Amiruddin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo.
- Hadikusuma, Hilman, 1993, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Cipta Aditya Bhakti.
- Maruci, Muslich, 1990, *Ilmu Waris*, Semarang: Penerbit Mujahidin.
- Sri Wiyarti, Mg, 2000, *Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bagian B, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Soepomo, 1993, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soekanto, Soerjono, 1988, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wignyodipoero, Soerojo, 1990, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung.

Wicaksono, Satrio, 2011, *Hukum Waris: Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta: Transmedia Pustaka.

Internet/Website

Ajaran Samin. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ajaran_Samin. Diunduh pada hari Senin 12 Oktober 2016. Pukul 13:35.

Arti kata janda. <http://kbbi.web.id/janda>. Diunduh pada hari Senin 12 Oktober 2016. Pukul 13:35.